



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLYA ZULAIKHA
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
3. NHK : 643582

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah Seluas 1.058 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m²/216 m² di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 226.100.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, AVANZA ALL NEW Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.162.324

F. HARTA LAINNYA Rp. 16.000.000

Sub Total Rp. 1.597.262.324

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.597.262.324

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.